

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, perencanaan pembangunan terbagi kedalam perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. Ketiga bentuk perencanaan di daerah menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah dijabarkan secara Teknis dalam Peraturan PP Nomor 8 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyatakan bahwa salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD.

Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk Periode 1 (satu) Tahun yang memuatkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Dalam Penyusunan Renja SKPD harus mengacu pada Rancangan awal RKPD, Renstra SKPD hasil evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan periode sebelumnya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 - 2034);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 Seri E).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 adalah untuk mengetahui :

1. Program dan kegiatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023;
2. Lokasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rumah Sakit Jiwa daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023
3. Indikator Kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023;
4. Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif program dan kegiatan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023.

1. Merencanakan program dan kegiatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023
2. Mengevaluasi Renja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun Sebelumnya.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Prov. Kepulauan Bangka Belitung Tahun sebelumnya .
4. Perumusan tujuan dan sasaran Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023.

5. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja-SKPD, memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, bab ini

berisi tentang penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, tujuan dan sasaran Renja serta program dan kegiatan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, bab ini berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal

BAB IV

RPJMD, baik jenis program/kegiatan/Sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

PENUTUP, bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB V

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dari pelaksanaan program kegiatan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilakukan evaluasi terhadap penetapan Kinerja Tahun 2021 yang telah diselaraskan atau disesuaikan dengan rencana strategis 2017-2022 yang juga telah dilakukan review atau perubahan.

Berdasarkan Program dan Kegiatan yang ada. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui program yang ada dengan dana APBD Tahun 2021 termasuk Perubahan Anggaran yaitu Belanja Langsung

Adapun rincian dari realisasi anggaran Tahun 2021 dapat dijabarkan dibawah ini :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah

Dalam kegiatan ini terdapat dua sub kegiatan yaitu :

- a. **sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** dengan dana yang masuk tahun 2021 sebesar 21.368.650 dengan realisasi anggaran sebesar 5.805.000 atau sebesar 27,16% dan realisasi fisik 100%.

b. Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Anggaran yang masuk tahun 2021 sebesar 29.767.000 dengan realisasi 25.267.267 atau sebesar 84,88 % dan realisasi fisik sebesar 100%.

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari dua sub kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan Anggaran tahun 2021 sebesar 30.543.534.766 dengan realisasi sebesar 28.504.507.725 atau sebesar 93,33% dan realisasi fisik sebesar 100%.

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /semesteran SKPD dengan anggaran tahun 2021 sebesar 19.108.901 dengan realisasi sebesar 2.250.000 atau sebesar 11,77% dan realisasi fisik sebesar 100%.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran tahun 2021 sebesar 38.406.040 dengan realisasi anggaran sebesar 38.156.800 atau 99,35% dan realisasi fisik sebesar 100%

b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran tahun 2021 sebesar 40.391.750 dengan realisasi sebesar 39.672.750 atau sebesar 98,21% dan realisasi fisik sebesar 100%

b. Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Anggaran yang masuk tahun 2021 sebesar 29.767.000 dengan realisasi 25.267.267 atau sebesar 84,88 % dan realisasi fisik sebesar 100%.

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari dua sub kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan Anggaran tahun 2021 sebesar 30.543.534.766 dengan realisasi sebesar 28.504.507.725 atau sebesar 93,33% dan realisasi fisik sebesar 100%.

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /semesteran SKPD dengan anggaran tahun 2021 sebesar 19.108.901 dengan realisasi sebesar 2.250.000 atau sebesar 11,77% dan realisasi fisik sebesar 100%.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran tahun 2021 sebesar 38.406.040 dengan realisasi anggaran sebesar 38.156.800 atau 99,35% dan realisasi fisik sebesar 100%

b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran tahun 2021 sebesar 40.391.750 dengan realisasi sebesar 39.672.750 atau sebesar 98,21% dan realisasi fisik sebesar 100%

c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Pagu anggaran tahun 2021 sebesar 79.780.000 dengan realisasi sebesar 61.630.000 atau sebesar 77,25% dan realisasi fisik sebesar 100%

d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan pagu anggaran tahun 2021 sebesar 199.756.913 dengan realisasi anggaran sebesar 122.286.462 atau sebesar 61,21% dan realisasi fisik sebesar 100%

e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan pagu anggaran tahun 2021 sebesar 12.000.000 dengan realisasi sebesar 7.929.000 atau 66,07% dan realisasi fisik sebesar 100%

f. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan pagu anggaran tahun 2021 sebesar 15.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar 4.190.000 atau sebesar 27,93% dan realisasi fisik sebesar 100%.

g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran tahun 2021 sebesar 231.237.000 dengan realisasi anggaran sebesar 214.050.984 atau sebesar 92,56% dan realisasi fisik sebesar 100%

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Untuk kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pagu anggaran tahun 2021 untuk sub kegiatan ini sebesar 9.976.500 dengan realisasi 7.065.000 atau 70,82% dan realisasi fisik sebesar 100%

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pagu Anggaran tahun 2021 untuk sub kegiatan ini sebesar 551.600.000 dengan realisasi sebesar 488.014.840 atau sebesar 88,47% dan realisasi fisik sebesar 100%

c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pagu anggaran tahun 2021 untuk sub kegiatan ini sebesar 23.080.000 dengan realisasi anggaran sebesar 16.956.000 atau sebesar 73,47% dan realisasi fisik sebesar 100%

d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pagu anggaran tahun 2021 untuk sub kegiatan ini sebesar 2.561.300.000 dengan realisasi sebesar 2.464.725.385,30 atau sebesar 96,23% dan realisasi fisik sebesar 100%

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Kegiatan ini terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya

Pagu Anggaran Tahun 2021 untuk Sub Kegiatan ini sebesar 35.500.000 dengan realisasi sebesar 28.529.403 atau sebesar 80,36% dan realisasi fisik sebesar 100%

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

Pagu anggaran tahun 2021 untuk sub kegiatan ini sebesar 73.800,000 dengan realisasi keuangan sebesar 32.229.200 atau sebesar 43,67% dan realisasi fisik sebesar 100%

6. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

Untuk kegiatan ini terdiri dari satu sub Kegiatan yaitu

a. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Pagu Tahun Anggaran 2021 untuk ksub kegiatan ini sebesar 10.000.000.000 dengan realisasi sebesar 9.757.613.760,86 atau sebesar 97,57% dan realisasi fisik sebesar 100%

1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan , UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Kegiatan ini terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit

Pagu Anggaran Tahun 2021 untuk sub kegiatan ini sebesar 4.200.000.000 dengan realisasi sebesar 4.116.571.702,58 atau sebesar 98,01% dan realisasi fisik sebesar 100%

b. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah sakit

Pagu anggaran tahun 2021 untuk sub kegiatan ini sebesar 138.294.000 dengan realisasi sebesar 136.406.000 atau sebesar 98,63% dan realisasi fisik sebesar 100%

c. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

Pagu anggaran 2021 untuk Sub Kegiatan ini sebesar 1.025.260.690 dengan realisasi sebesar 932.380.000 atau sebesar 90,94 % dan realisasi fisik sebesar 100%

d. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan alat Kalibrasi

Pagu Anggaran tahun 2021 untuk sub kegiatan ini sebesar 100.000.000 dengan realisasi sebesar 98.895.377 atau sebesar 98,89% dan realisasi fisik sebesar 100%

e. Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis pakai lainnya)

Pagu Anggaran tahun 2021 sebesar 144.858.000 dengan realisasi anggaran sebesar 143.544.720 atau sebesar 99,09% dan realisasi fisik sebesar 100%

f. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan

Pagu anggaran tahun 2021 untuk Sub Kegiatan ini sebesar 80.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar 78.925.000 atau sebesar 98,65% dan realisasi fisik sebesar 100%

g. Sub Kegiatan Pemeliharaan alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

Pagu Anggaran tahun 2021 untuk sub kegiatan ini sebesar 84.367.000 dengan realisasi sebesar 82.698.000 atau sebesar 98,02 % dan realisasi fisik sebesar 100%

**2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan ,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**

Kegiatan ini terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Pagu Anggaran 2021 Untuk Sub Kegiatan ini sebesar 131.945.000 dengan realisasi sebesar 123.639.021 atau sebesar 93,70 % dan realisasi fisik sebesar 100%

b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

Pagu Anggaran tahun 2021 ini sebesar 58.940.000 dengan realisasi sebesar 35.750.000 atau sebesar 60,66% dan realisasi fisik sebesar 100%

c. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Pagu Anggaran untuk Kegiatan ini sebesar 52.623.020 dengan realisasi sebesar 36.870.000 atau sebesar 70,06% dan realisasi fisik sebesar 100%

d. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA

Pagu anggaran 2021 untuk sub kegiatan ini sebesar 80.074.398 dengan realisasi sebesar 59.359.100 atau 74,13% dan realisasi fisik sebesar 100%

3. Kegiatan Penerbitan Izin rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat daerah Provinsi

Kegiatan ini terdiri dari satu Sub Kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Pagu anggaran tahun 2021 untuk sub kegiatan ini sebesar 73.900.000 dengan realisasi sebesar 31.475.000 atau 42,59% dan realisasi fisik sebesar 100%

4. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber daya Manusia Kesehatan

Pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar 510.141.994 dengan realisasi anggaran sebesar 290.946.278 atau 57.03% dan realisasi fisik sebesar 100%

b. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber daya Manusia Kesehatan

Pagu Anggaran 2021 untuk kegiatan ini sebesar 58.919.450.664 dengan realisasi sebesar 54.930.277.051,74 atau 93,22% dan realisasi fisik sebesar 100%

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi kepulauan Bangka Belitung dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah dapat dilihat dari hubungan antara prioritas pembangunan nasional, RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Tupoksi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	TUPOKSI RSJD
Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang bebas korupsi bermanfaat dan terpercaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi 2. Penguatan rural urban ling kages 3. Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah 4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 5. Restorasi, reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang 6. Pengembangan 	<p>Tugas Pokok Rumah Sakit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Upaya Promotif ,preventif, kuratif dan rehabilitative terhadap kesehatan jiwa, korban narkoba dan kesehatan lainnya sesuai kebutuhan daerah dan kewenangan yang dilimpahkan Gubernur 2. Melakukan

- | | |
|--|--|
| wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil | pelayanan bermutu yang terakreditaasi sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. |
| 7. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Fungsi Rumah Sakit : |
| 8. Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun | 1. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan jiwa dan korban narkoba perorangan ataupun masyarakat melalui pelayanan paripurna tingkat sekunder dan tersier |
| 9. Peningkatan pelayanan kesehatan | 2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan jiwa dan penanganan korban narkoba. |
| 10. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | 3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan jiwa dan narkoba dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan. |

4. Pelaksanaan administrasi dan keuangan rumah sakit jiwa

Bila memperhatikan table diatas, terlihat pelaksanaan tupoksi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada dasarnya relevan dengan kebijakan Nasional RPJMN , RPJMD dan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 sehingga hal tersebut sekaligus bila dikaitkan dengan beberapa hal penting pada bab sebelumnya dapat diwujudkan upaya penanganannya secara optimal dan terkoordinasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapai dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Merujuk kepada evaluasi pembangunan tahun 2021 dan tahun berjalan tahun 2022 serta perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2023, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023 mengacu kepada visi Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 – 2022 .

3.3 Program dan kegiatan

Rencana Program dan kegiatan prioritas yang disusun ini merupakan uraian rinci yang menjelaskan kode rekening, nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, catatan penting, serta prakiraan maju tahun rencana yang meliputi target capaian kerja dan kebutuhan dana/pagu indikatifnya.

Program prioritas yang direncanakan dibiayai tahun 2023 adalah

1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah
2. Program Peningkatan Pelayanan Teknik Medik Kejiwaan

Renja RSJD tahun 2023 merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan pemerintah Provinsi kepulauan Bangka Belitung di bidang Kesehatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan tahun 2021 dan perkiraan yang akan dicapai pada pelaksanaan tahun 2023. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan Kesehatan yang telah dilaksanakan, kemudian dibuat analisisnya sebagai bahan perencanaan bidang kesehatan untuk dapat memecahkan permasalahan di tahun-tahun sebelumnya, agar perencanaan menjadi lebih efektif dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Bangka Belitung.

Perencanaan bidang kesehatan jiwa yang telah disusun bersama ini, tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang ada di

RSJD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan dibidang

kesehatan secara bertahap, terutama permasalahan kesehatan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan .

Rencana Kerja RSJD tahun 2023 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu penting dan prioritas pembangunan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi RSJD sekaligus mendukung Visi dan Misi Gubernur Terpilih.

Seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 memuat indikasi capaian kinerja baik terhadap capaian kinerja yang berkesinambungan maupun terhadap capaian kinerja sebelumnya.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan UPTD RSDJ Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tahun 2023 sebesar Rp,- secara rinci rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 termuat dalam table 4.1, sebagai berikut:

Table 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Dan Perkiraan Maju 2023 Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Recana T		
									Lokasi		
									Kabupaten	Kecamatan	Kelura
(1)				(2)	(3)			(4)			
1					Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
1	0				Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan						
1	0	0			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Nilai Sakip PD					
1	0	0	1.	01	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Recana T					
			Lokasi					
			Kabupaten	Kecamatan	Kelura			
(1)	(2)	(3)	(4)					
		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah						
1.02.1.01.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah dokumen perencanaan PD	Bangka	Sungailiat	Par	Pada
1.02.1.01.7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah dokumen Evaluasi kinerja PD	Bangka	Sungailiat	Par	Pada
		survey kepuasan pelayanan internal						
1.02.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
		Indeks kepuasan pelayanan keuangan						
1.02.1.02.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Bangka	Sungailiat	Par	Pada
1.02.1.02.7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			Jumlah laporan keuangan bulanan/Semesteran	Bangka	Sungailiat	Par	Pada
1.02.1.##	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Recana T		
			Lokasi		
			Kabupaten	Kecamatan	Kelura
(1)	(2)	(3)	(4)		
		Survey kepuasan pelayanan internal			
1.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
		Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	Bangka	Sungailiat	Parit Padang
1.01.1.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
		Jumlah paket peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Bangka	Sungailiat	Parit Padang
1.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
		Jumlah bahan logistik kantor yang dibeli	Bangka	Sungailiat	Parit Padang
1.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
		Jumlah barang cetak, Jumlah Penggandaan	Bangka	Sungailiat	Parit Padang
1.01.1.06.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Bangka	Sungailiat	Parit Padang
1.01.1.06.08	Sub Kegiatan fasilitasi kunjungan tamu				
		Jumlah kunjungan tamu	Bangka	Sungailiat	Parit Padang
1.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Recana T		
			Lokasi		
			Kabupaten	Kecamatan	Kelura
(1)	(2)	(3)	(4)		
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang tersedia , jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bangka	Sungailiat	Parit
	Sub Kegiatan Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan arsip yang tersedia	Bangka	Sungailiat	Parit
1	021##	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana yang dibeli	Bangka	Sungailiat	Parit
1	021##	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
		Survey kepuasan pelayanan umum			
1	0111.08	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
		Jumlah materai yang dibeli, jumlah surat yang dikirim	Bangka	Sungailiat	Parit
1	0111.08	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
		Jumlah bulan tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, internet, tv	Bangka	Sungailiat	Parit

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Recana T		
			Lokasi		
			Kabupaten	Kecamatan	Kelura
(1)	(2)	(3)	(4)		
		kabel, virtual meeting yg dibayar			
	Sub.Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Bangka	Sungailiat	Par Pada
1 0 0 1. 0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
		Jumlah tenaga kontrak ,jumlah pengelola jasa kebersihan kantor	Bangka	Sungailiat	Par Pada
1 0 0 ##	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah				
		Survey kepuasan pelayanan umum			
1 0 0 1. 0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
		Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	Bangka	Sungailiat	Par Pada
1 0 0 1. 0	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
		Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Bangka	Sungailiat	Par Pada
1 0 0 1. 0	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan	Bangka	Sungailiat	Par Pada

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Recana T								
									Lokasi								
									Kabupaten	Kecamatan	Kelura						
(1)					(2)					(3)			(4)				
								yang di pelihara/dir ehabilitasi									
1	0	0	##	#	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD												
								CCR (Cost Recoverl y rate Parsial)									
1	0	0	1.	0	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD												
								CCR(cost Recovery rate parsial)	Bangka	Sungailiat							
								Jumlah Belanja Barang dan Jasa	Pangkalpi nang	Bukit Intan							
1	0	0			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
								Perse ntase masya rakat ataupun perora ngan yang menda pat upaya oelaya nan keseh atan									
1	0	0	1.	01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi												
								Persent ase fasilitas pelayan an, sarana prasaran a dan alat									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Recana T			
			Lokasi			
			Kabupaten	Kecamatan	Kelura	
(1)	(2)	(3)	(4)			
		kesehat an				
1	0	0	1.	0	Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit (DAK)	
	1	2	01	4		
						Jumlah bangunan rumah sakit yang dibangun
						Bangka
						Sungailiat
						Par Pada
					Sub kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Sakit	
						Jumlah bangunan rumah sakit yang di rehabilitasi
						Bangka
						Sungailiat
						Par Pada
					Sub Kegiatan Pengadaan alat kesehatan. Alat Penunjang Medis Fasilitas Layanan Kesehatan (DAK)	
						Jumlah alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang dibeli
						Bangka
						Sungailiat
						Par Pada
					Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan alat kalibrasi	
						Jumlah alat kesehatan yang terkalibrasi
						Bangka
						Sungailiat
						Par Pada
					Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai lainnya (Sprei, Handuk, dan habis pakai lainnya)	
						Jumlah spre, handuk, dan pakaian habis pakai yang dibeli
						Bangka
						Sungailiat
						Par Pada
					Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan alat-alat kesehatan/peralatan laboratorium kesehatan	
						Jumlah alat kesehatan/ peralatan laboratorium kesehatan yang disediakan/ dipelihara
						Bangka
						Sungailiat
						Par Pada
					Sub Kegiatan Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	
						Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang disediakan
						Bangka
						Sungailiat
						Par Pada
					Sub Kegiatan Pemeliharaan alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	
						Jumlah Alat Kesehatan /alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang sesuai
						Bangka
						Sungailiat
						Par Pada

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Recana T			
			Lokasi			
			Kabupaten	Kecamatan	Kelura	
(1)	(2)	(3)	(4)			
		standar				
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan , UKM dan UKM Rujukan tingkat daerah provinsi	Persentase Pelayanan kesehatan terhadap upaya kesehatan masyarakat , perseorangan dan rujukan pada rumah sakit jiwa				
1	001.06	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Limbah Rumah Sakit yang dikelola selama satu tahun	Bangka	Sungailiat	Par Pada
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Sekolah mendapat penyuluhan	Bangka	Sungailiat	Par Pada
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Bangka	Sungailiat	Par Pada
1	001.10					
		Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah gangguan jiwa (ODMK)	Bangka	Sungailiat	Par Pada

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Recana T		
			Lokasi		
			Kabupaten	Kecamatan	Kelura
(1)	(2)	(3)	(4)		
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Bangka	Sungailiat	Par Pada
	Sub Kegiatan Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujuk Balik di fasilitas Pelayanan Kesehatan	Bangka	Sungailiat	Par Pada
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan orang dengan kecanduan NAPZA	Jumlah kunjungan pasien ke rehabilitasi psikososial	Bangka	Sungailiat	Par Pada
	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan layanan rumah sakit			
1.02.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Jumlah sertifikat akreditasi Yang di peroleh	Bangka	Sungailiat	Par Pada
1.02.1.2	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut perizinan RS kelas B	Rumah Sakit kelas B fasilitas pelayanan kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya	Bangka	Sungailiat	Par Pada
	Sub Kegiatan Peningkatan Tata kelola Rumah Sakit	Jumlah RS yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar	Bangka	Sungailiat	Par Pada
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang mendapat Rehabilitasi	Bangka	Sungailiat	Par Pada

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Recana T		
			Lokasi		
			Kabupaten	Kecamatan	Kelura
(1)	(2)	(3)	(4)		
		Medis			
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	Bangka	Sungailiat	Par Pada
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan kesehatan lingkungan	Bangka	Sungailiat	Par Pada
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi yang berfungsi	Bangka	Sungailiat	Par Pada
1	012	PROGRAM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan			
1	021	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi			Persentase Sumber daya Kesehatan yang tersedia untuk UKM dan UKP Provinsi
		Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber daya manusia kesehatan	Bangka	Sungailiat	Par Pada
1	021	Kegiatan Pengembangan mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			Persentase Sumber daya Kesehatan yang tersedia untuk UKM dan UKP Provinsi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Recana T			
			Lokasi			
			Kabupaten	Kecamatan	Kelura	
(1)	(2)	(3)	(4)			
	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia kesehatan yang dilaksanak an	Bangka	Sungailiat	Par Pada
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia		Jumlah Laporan Audit Keperawata n	Bangka	Sungailiat	Par Pada

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi hasil kerja selama satu tahun dan menjadi acuan dalam perencanaan tahun selanjutnya sehingga dapat menentukan program kegiatan yang menjadi prioritas dan memperbaiki kekurangan atau kelemahan baik dalam merencanakan kegiatan serta pelaksanaan kegiatan tersebut.

Untuk mendukung tercapainya pelaksanaan tujuan dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Terwujudnya pelayanan kesehatan jiwa dan non jiwa yang paripurna meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative serta meningkatkan mutu pelayanan Rumah sakit sesuai standar pelayanan maka program/kegiatan yang direncanakan sangat mendukung terlaksananya tujuan tersebut.

Dalam pelaksanaan rencana kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai akhir tahun Renstra masih adanya program/kegiatan yang belum tercapai sesuai target, hal ini dikarenakan ketersediaan anggaran yang masih kurang dengan kebutuhan serta masih kurangnya SDM maupun kualitas SDM pada RSJD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun hal-hal yang harus ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan RSJD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut adalah :

1. Mengusulkan Program/Kegiatan peningkatan jumlah tenaga Kesehatan Rumah Sakit Sesuai Standar Rumah Sakit Jiwa.
2. Mengusulkan Program/Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai Standar Rumah Sakit Jiwa.
3. Mengusulkan Program/Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan rumah sakit sesuai klasifikasi rumah sakit jiwa .

Sungailiat, Maret 2023

Direktur

UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah

Dinas Kesehatan

Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

dr. Ria Agustine

NIP. 19810815 201001 2 010

